

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Laporan Tugas Pembantuan, Laporan Tugas Umum Pemerintahan dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintahan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum ditetapkan, maka penyusunan LPPD Tahun 2018 masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Secara menyeluruh pembangunan Jawa Tengah pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup berarti, dapat disadari pula masih banyak permasalahan yang belum ditangani secara optimal karena terkendala dengan aspek lain, baik terkait dengan keterbatasan anggaran, SDM maupun regulasi. Tentu saja hal tersebut tidak menyurutkan langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian buku laporan ini kami susun, tentu saja masih banyak kekurangannya, besar harapan kami buku laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemda Tahun 2018 yang masih berupa rekomendasi pada daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah guna mewujudkan peningkatan daya saing, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta penentuan status (peringkat) kinerja daerah secara Nasional di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.